BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Hasil kerja praktik di DPRD Provinsi Lampung menunjukkan bahwa Website JDIH masih menghadapi berbagai kendala teknis. Beberapa masalah yang sering muncul adalah website yang tiba-tiba tidak dapat diakses, gambar atau dokumen hukum yang tidak muncul, serta kinerja sistem yang sangat bergantung pada pihak ketiga sehingga membatasi kontrol pengelolaan.

Untuk memperjelas hasil analisis Website JDIH DPRD Provinsi Lampung dengan menggunakan metode WebQual, maka disajikan ringkasan hasil evaluasi berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu *usability*, *information quality*, dan *service interaction*.

Dimensi WebQual	Indikator Penilaian	Hasil Evaluasi	Kategori
Usability	• Kemudahan Navigasi • Konsistensi tampilan • Kejelasan Menu	Website cukup mudah digunakan, tetapi navigasi masih belum konsisten sehingga membingungkan pengguna baru.	Cukup
Information Quality	• Keakuratan Data • Kelengkapan informasi • Pembaruan Konten	Informasi hukum tersedia cukup lengkap, tetapi beberapa dokumen tidak diperbarui secara berkala.	Cukup
Service Interaction	• Kecepatan akses • Kendala sistem		Kurang

	• Fitur interaktif pengguna		

Tabel 4. 1 Hasil Analisis Website JDIH

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Website JDIH DPRD Provinsi Lampung masih memerlukan sejumlah perbaikan, terutama pada aspek service interaction yang berada dalam kategori kurang, serta pada aspek *usability* dan information quality yang masih dalam kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas website belum optimal dalam mendukung keterbukaan informasi publik, sehingga perlu dilakukan peningkatan sesuai dengan rekomendasi yang telah dirancang.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode WebQual, dapat disimpulkan bahwa Website JDIH DPRD Provinsi Lampung sudah berperan dalam mendukung transparansi lembaga legislatif daerah, namun masih terdapat beberapa kelemahan teknis dan non-teknis yang perlu ditingkatkan.

1. **Peran Website JDIH dalam Transparansi**

   Website JDIH menyediakan dokumen hukum seperti perda, keputusan, dan peraturan DPRD yang dapat diakses masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan informasi publik yang mendukung prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. **Kendala Transparansi Akibat Kualitas Website**

   Keterbukaan informasi tidak berjalan optimal apabila website sulit diakses atau informasi yang disajikan tidak mutakhir. Transparansi menuntut konsistensi dalam memberikan data yang benar, lengkap, dan tepat waktu.

3. **Relevansi Metode WebQual**

   - Pada *usability,* website perlu perbaikan antarmuka agar lebih ramah pengguna.
   - Pada *information quality,* diperlukan pembaruan konten secara berkala untuk meningkatkan kepercayaan publik.
   - Pada *service interaction,* stabilitas akses dan adanya fitur interaktif menjadi kunci perbaikan agar masyarakat merasa dilibatkan.

4. **Dampak Peningkatan Website terhadap DPRD**

Dengan adanya perbaikan, Website JDIH akan menjadi sarana yang efektif dalam menyampaikan produk hukum daerah, memperkuat akuntabilitas DPRD, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.